

IMPLEMENTASI DEMOKRASI DAN MASALAH KORUPSI DI INDONESIA

(Telah Kritis terhadap Perilaku Korupsi pada Masa Transisi Demokrasi)

HARIS EL MAHDI
Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Brawijaya
Facebook: harismahdi@yahoo.com

RATIH NUR PRATIWI
Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Brawijaya

ABSTRACT

Democratization is an ongoing process, and one that is becoming increasingly irreversible. But, in most development countries the democracy is growing very slowly, including in Indonesia. The democracy transition in the country of Indonesia has been begun since thirteen years ago. The main problem of democracy transition in Indonesia is corruption. Worriedly, the corruption in Indonesia is becoming widespread from central to local level. This article argues that the problem of corruption eradication in Indonesia is not handled seriously by the elites (the government)

Key words: Democracy, Democracy Transition, Corruption.

PENDAHULUAN

Perkataan demokrasi pertama kali diciptakan oleh sejarawan Yunani, Herodatus, pada abad 5 SM. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat (*demos*: rakyat; *kratein*: memerintah). Sistem ini sudah sejak awal mendapat kritik tajam dari pemikir Yunani lainnya seperti Plato, Aristoteles, dan bahkan Thucydides, karena mereka menilai bahwa warga negara biasa tidak kompeten untuk memerintah, tidak mampu melihat segala sesuatu di luar jangkauan kepentingan pribadi jangka pendek. Hal ini terutama merupakan pendapat Plato, seorang filsuf elitis Yunani. Tetapi, orang Yunani kuno umumnya percaya bahwa demokrasi adalah tatanan politik yang terbaik untuk menciptakan kestabilan politik (Waltzer, 1975: 192-193). Bahkan, Winston Churchill pun berujar: "*Democracy is worst possible form of government.....*" - Demokrasi adalah kemungkinan terburuk dari sebuah pemerintahan.....

Lepas dari segala kelemahannya, di akhir abad 20 hampir tidak ada bangsa di muka bumi yang tak mengaitkan diri kepada demokrasi sebagai sistem politik, baik sungguh-sungguh maupun pura-pura. Tentang hal ini, Samuel P Huntington, direktur *Center for International Affairs* (CFIA) Universitas Harvard mengungkapkannya sebagai berikut :

"Democratization is an ongoing process, and one that is becoming increasingly irreversible" (Tsong dan Vaylsteke, 1989).

(Demokratisasi adalah suatu proses terus-menerus, yang kini semakin tidak bisa dibalikkan lagi).

Memaknai ungkapan dari Huntington di atas, demokrasi dianggap sebagai sebuah kemestian sejarah yang dewasa ini sedang berlangsung dan tak mungkin untuk kembali surut ke belakang. Dunia saat ini sedang menjadikan demokrasi sebagai "*grand experiment*" untuk menata

kehidupan sosial-politiknya (Madjid, 1997; Ma'arif, 1996), tak terkecuali dengan yang terjadi di Indonesia. Tak heran jika Francis Fukuyama - dengan arogan - menegaskan bahwa demokrasi adalah titik akhir perjalanan evolusi ideologi manusia, *The End History of Man*.

Namun demikian - dalam sejarahnya - demokrasi selalu memunculkan pemaknaan yang beragam sesuai dengan kondisi kultur, jaman, dan sentimen politik. Untuk konteks Indonesia, wajah demokrasi mengalami beberapa kali metamorfosis. Tahun 1945-1958 Indonesia menggunakan istilah Demokrasi Liberal. Namun dalam rentang pelaksanaannya, baru pada tahun 1955 - ketika dilaksanakan Pemilu I - Indonesia benar-benar menerapkan Demokrasi Liberal yang utuh. Kemudian, Soekarno - di masa-masa akhir kekuasaannya - membuat istilah Demokrasi Terpimpin yang cenderung otoriter dan di era Orde Baru - Soeharto - mempopulerkan istilah Demokrasi Pancasila, yang juga tidak jauh dari watak otoritarianisme. Pasca lengsernya Soeharto, Indonesia juga "masih" menggunakan (istilah) demokrasi sebagai alat untuk menata kehidupan berbangsa.

Belajar dari pemerintahan rejim Soeharto yang korup, rejim era reformasi mempunyai agenda tambahan untuk memperkuat implementasi demokrasi, yaitu agenda pemberantasan korupsi. Isu tentang pemberantasan korupsi menjadi diskursus sentral era reformasi karena diyakini bahwa korupsi yang sejatinya menggerogoti pemerintahan Soeharto. Franz Magnis Suseno (2003) menulis:

"Mengapa rezim Pak Harto Jatuh? Karena kebijakan ekonomi yang tidak tepat? Karena kesalahan konseptual? Bukan..! Sebabnya rezim Pak Harto jatuh adalah korupsinya yang bak pasukan rayap, menggerogoti ketahanan ekonomis, menggerogoti sistem hukum, ketahanan moral dan akhirnya ketahanan nasional bangsa Indonesia"

Artinya, korupsi telah menjadi musuh bersama seluruh elemen bangsa pada era reformasi. Korupsi disignifikasikan sebagai 'biang kerok' kegagalan pembangunan dan kehancuran demokrasi. Permasalahannya - setelah ± 13 tahun lebih rejim reformasi berjalan - gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak menghasilkan kontribusi apapun. Alih-alih korupsi dapat dibasmi - modus korupsi semakin beragam, perilaku korupsi semakin massif dan terang-terangan, dan hukum tak kuasa menghadapi para koruptor. KPK sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk pemberantasan korupsi hanya bertaji diawal-awal pembentukannya.

Tulisan ini mencoba menelusuri keterkaitan korupsi dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Mencari jawab dua hal yang saling bertolak-belakang. Demokrasi menghendaki adanya transparansi dan kejujuran. Sebaliknya, korupsi justru anti-transparansi dan anti kejujuran.

TREND DEMOKRASI DI AKHIR ABAD 20 DAN AWAL ABAD 21

Pada tahun 1991, *Freedom House* merilis hasil surveinya dengan temuan bahwa 45% negara di dunia adalah negara demokratis. Hasil ini menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi di dunia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Inisiasi dari *Freedom House* tersebut menginspirasi Samuel Huntington (1991) untuk memaparkan data historis tentang pasang-surut implementasi demokrasi di dunia. Dari hasil kajiannya, Huntington melihat bahwa laju demokrasi adalah sesuatu yang tak mungkin dihambat. Demokrasi sedang dan harus menjadi pilihan utama sebuah negara dalam menata kehidupan berbangsa.

Lebih jauh, Huntington (1991) membagi gelombang demokratisasi menjadi tiga fase, yaitu:

- Gelombang panjang demokratisasi pertama (1828 - 1926) yang berakar pada Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika Serikat.
- Gelombang titik balik pertama (1922 - 1942) yang berakar dari tumbuhnya negara-negara fasis di Italia dan Jerman, yang kemudian menyebarkan kudeta militer di Portugal (1926), Brasil dan Argentina (1930), otoritarianisme di Uruguay (1933) dan kudeta yang mematenkan negara republik di Spanyol (1936).
- Gelombang demokratisasi kedua (1943 - 1962) yang berakar pada pendudukan oleh tentara Sekutu pada masa Perang Dunia II dan sesudahnya (termasuk yang sebelumnya otoriter).
- Gelombang titik balik kedua (1958 - 1975) yang ditandai dengan naiknya rezim otoritarian di Amerika Latin (Peru, Uruguay, Chile, Bolivia, Ekuador, Brasil, dan Argentina), Asia (Pakistan, Korea, Indonesia, Filipina, India, Taiwan), Eropa (Yunani, Turki) dan Afrika (hampir seluruhnya Afrika, khususnya Nigeria - tahun 1966 dikudeta oleh militer).
- Gelombang demokratisasi ketiga (1974 - sekarang) yang dimulai dengan meninggalnya Jendral Franco di Spanyol yang mengakhiri rejim militer di Eropa Tengah pada tahun 1975, ketika Raja Juan Carlos dengan bantuan PM Adolfo Suarez memperoleh persetujuan parlemen dan rakyat untuk menyusun konstitusi baru yang demokratis, dan di Portugal sekelompok perwira militer muda melakukan kudeta kepada Marcello Caetano. Selama setahun, Portugal mengalami transisi yang penuh drama, namun akhirnya kelompok pro-demokrasi menjadi pemenang. Di Turki, militer mengundurkan diri dari politik (1983), di Filipina Ferdinand Marcos jatuh oleh people power (1986), di Korea oposisi memenangkan pemilu (1987). Hongaria berubah menjadi multi-partai (1988), di Polandia Partai Solidaritas pimpinan Walesa berhasil merubah Polandia menjadi negara non-komunis, runtuhnya Uni Soviet (1990), berakhirnya rejim Marxis-Leninis di Grenada (1983) dan diktator Noriega di Panama (1989).

Analisis dari Huntington tersebut sejajar dengan premis yang dibuat oleh John Markoff (1996), yang mengemukakan adanya "gelombang anti demokrasi" pada tahun 1950 sampai 1970-an, namun kemudian dibalikkan dengan adanya "gelombang demokratisasi" yang terjadi pada tahun 1970 sampai 1990-an.

Rentetan gelombang ketiga demokratisasi seperti yang dipaparkan oleh Huntington dan Markoff di atas terus berlanjut dan menggejala sampai memasuki awal abad 21 ini. Ditandai dengan runtuhnya rejim Soeharto pada tahun 1998 dan di awal tahun 2011 wilayah Timur-Tengah mengalami gerakan massif menuntut demokrasi dan kebebasan. Meski kita belum tahu ke arah mana angin perubahan yang terjadi di Timur-Tengah tersebut.

Praktis, di awal abad 21 ini, semua negara berlomba-lomba menggunakan istilah demokrasi dalam memaknai sistem ketata-negaraan yang sedang mereka jalankan, tidak terkecuali Indonesia.

MASA TRANSISI DEMOKRASI: KASUS INDONESIA

Diskusi kita di atas - dengan berbasis data dari Freedom House - menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah keharusan, sebuah fakta historis yang tak mungkin dibalikkan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengetahui "cara" menuju demokrasi. Menurut Mas'ud (1994), paling tidak ada tiga pendekatan menuju demokrasi (seperti yang terekam dalam Tabel 1), yaitu: 1) pendekatan yang mempercayai bahwa demokrasi dikembangkan melalui modernisasi, 2) demokrasi adalah sebuah pilihan sadar yang bersifat linear, dan 3) demokrasi terbentuk karena adanya perubahan struktur dan kelembagaan politik.

Namun demikian, untuk kasus Indonesia - dan juga mungkin Timur-Tengah - pilihan menuju demokrasi tidak disebabkan oleh tiga pendekatan seperti yang ditawarkan oleh Mas'ud. Indonesia memilih jalan demokrasi lebih disebabkan faktor eksternal daripada faktor internal, yaitu karena hantaman krisis moneter yang berawal dari Asia Timur. Regim otoriter Orde Baru runtuh tidak murni disebabkan oleh gerakan pro-demokrasi. Gerakan-gerakan demonstrasi jalanan yang digalang mahasiswa muncul belakangan setelah harga-harga kebutuhan pokok melonjak drastis sebagai imbas dari krisis moneter.

Tabel 1. Tiga Cara Memahami Transisi Demokrasi

Pendekatan	Modernisasionis (Misal: Seymour Martin Lipset)	Transisional (Misal: Dunkwart Rustow)	Struktural (Misal: Barrington Moore, Jr)
Fokus Perhatian	Kondisi sosial ekonomi yang mendukung demokrasi liberal, terutama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.	Proses politik/dan perilaku elit/pimpinan politik (inisiatif yg mereka ajukan dan pilihan-pilihan yg mereka tetapkan.	Perubahan struktural kekuasaan yang mendukung demokrasi.
Implikasi Praktis	Perlu diusahakan syarat-syarat peningkatan kesejahteraan sosial sehingga muncul kelas menengah yang cukup independen untuk mendukung demokratisasi politik.	Mendorong berlangsungnya proses politik yang memungkinkan para pemimpin berkepentingan untuk berinisiatif melakukan transformasi dan menetapkan pilihan kebijakan secara konsisten mendukung demokratisasi.	Mengubah hubungan kekuasaan antara kelas, negara, dan aktor transisional sehingga mendukung demokratisasi.

Sumber : Mas'ud, 1994

Sebelum terjadinya krisis moneter, tidak ada satupun analis politik yang memprediksi bahwa Regim Soeharto akan runtuh. Bagaimana tidak, Soeharto berhasil mengkondisikan Indonesia menjadi salah satu kekuatan Asia yang diperhitungkan dalam pentas percaturan politik Internasional, yang didukung oleh keadaan dalam negeri yang "kondusif" (sengaja dengan tanda

petik), yang ditandai dengan: Kuatnya hegemoni Soeharto; kondisi ekonomi yang stabil dilihat dari kondisi makro ekonomi yang terkendali, terjangkaunya bahan-bahan kebutuhan pokok dan laju pertumbuhan ekonomi yang stabil; dan kondisi sosial-budaya yang "aman", dalam arti, selama kepemimpinan Soeharto, di negeri ini hampir tidak ada kerusuhan-kerusuhan sosial yang berarti.¹ Media massa menjadi "corong" pemerintah untuk mengendalikan keadaan masyarakat dan memperteguh hegemoni pemerintah - atau lebih tepatnya, hegemoni Soeharto. Benih-benih separatisme pun "tidur lelap" selama Orde Baru, karena ditindak tegas dan represif.

Artinya, dilihat dari perspektif politik, ekonomi dan sosial-budaya tidak ada alasan logis bahwa Soeharto akan runtuh. Semua lini kehidupan secara sistematis dikendalikan dan dikontrol oleh negara. Musuh-musuh potensial negara yang berposisi tidak berkutik, karena dengan sangat represif dan kejam, aparat-aparat negara akan memberangusnya.

Namun, takdir Indonesia berkata lain. Globalisasi - yang menghendaki terintegrasinya dunia - agaknya merupakan variabel penting yang tidak diperhatikan serius oleh Soeharto dan Orde Baru-nya. Krisis moneter yang melanda Asia Timur, pada mulanya dianggap sepi oleh para ekonom Orde Baru. Namun, bertahap tapi pasti, badai krisis pun sampai ke Asia Tenggara. Ibarat kartu domino, satu per satu negara Asia Tenggara berjatuh akibat badai krisis ini, termasuk - yang terparah - Indonesia. Apa yang terjadi di Asia medio akhir dasawarsa 1990-an menunjukkan bahwa ekonomi nasional sangat rentan dipengaruhi oleh kondisi dunia global. Kinnvall menganalisisnya sebagai berikut:

Globalization turns out to be a phenomenon at the end of the 20th century that makes a lot of things in the societal setting no more a matter of course. It makes nation states questionable and renders national borders less relevant than they were before. National economy becomes increasingly vulnerable in the face of global market especially global financial market to the extent that in some extreme cases it is not very clear anymore whether national economy is under the control of central bank or is dependent upon the situation of stock exchange. Global communication makes the exchange of the news of global and local affairs so intensive that some social scientists start introducing the notion "glocalization" (Kinnvall, 2002:4).

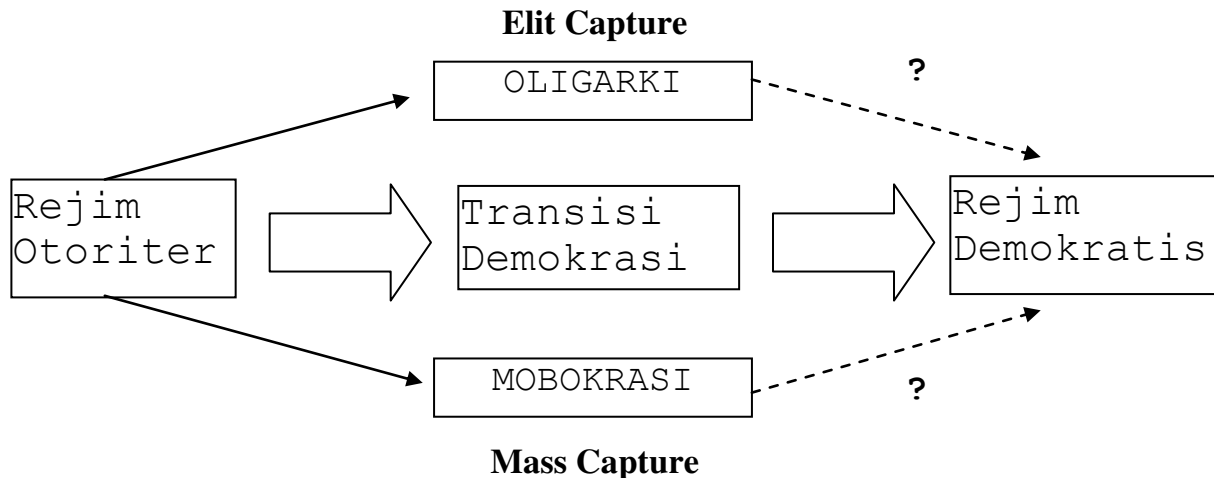
(Globalisasi hadir menjadi fenomena di akhir abad 20 yang membawa banyak implikasi dalam setting kemasyarakatan, tidak lagi sebatas menjadi bahan diskusi. Globalisasi menjadikan eksistensi negara-bangsa diragukan dan mengakibatkan batas-batas nasional tidak lagi relevan. Ekonomi nasional menjadi makin rentan dipengaruhi oleh kondisi pasar global terutama pasar keuangan global, dalam kasus ekstrim yang lebih luas, hal ini menjelaskan bahwa tidak sangat nyata ekonomi nasional dibawah kontrol bank sentral atau tergantung situasi pertukaran saham. Komunikasi global menjadikan pertukaran berita peristiwa global dan lokal sangat intensif sehingga beberapa ilmuwan sosial mengawalinya dengan sebuah gagasan "glokalisasi")

Krisis moneter inilah yang menjadi pemicu menguatnya dorongan para aktivis pro-demokrasi untuk menjatuhkan rejim otoritarianisme Soeharto. Sayangnya, dorongan untuk menjatuhkan Soeharto tersebut tidak diikuti dengan kesadaran tentang model pemerintahan pasca-Soeharto. Parahnya, pasca runtuhnya rejim Orde Baru, posisi Soeharto tidak pernah jelas dalam konstruk

¹ Hanya Kasus Malari yang menonjol, tetapi secara cepat dan sistematis dapat diatasi oleh instrumen-instrumen Orde Baru

hukum Indonesia. Hal ini disebabkan Soeharto tidak pernah dihadirkan di depan pengadilan untuk mempertanggung-jawabkan seluruh kesalahannya.

Alasan inilah yang menjelaskan mengapa masa transisi demokrasi di Indonesia sangat lambat. Bahkan, melihat kecenderungan-kecenderungan politik yang terjadi akhir-akhir ini, masa transisi demokrasi ini tidak akan pernah berujung pada implementasi demokrasi yang sungguh-sungguh. Sorensen (1993) menjelaskan bahwa transisi dari negara non-demokratis menuju negara demokratis merupakan proses yang kompleks dan melibatkan banyak tahapan. Kompleksitas tahapan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa transisi demokrasi tidak akan pernah menghasilkan demokrasi itu sendiri, seperti dapat dilihat dalam Bagan 1.



Bagan.1. Pemetaan Transisi Menuju Demokrasi

Sumber: Wirawan: 1998

Pemetaan dari Bagan 1 tersebut menjelaskan bahwa seringkali masa transisi demokrasi berjalan di tempat. Hal ini disebabkan proses demokratisasi di Indonesia sejatinya tidak didorong oleh kekuatan kelas menengah atau *civil society*, melainkan oleh elit yang "terdorong" oleh gerakan demokratisasi. Transisi demokrasi akhirnya hanyalah berujud mobilisasi demokrasi (Mobokrasi) yang tidak partisipatif yang justru memunculkan model kekuasaan oligarki, yaitu negara yang dikuasai hanya oleh segelintir kelompok tertentu. Masa transisi demokrasi seperti yang terjadi di Indonesia justru semakin menguntungkan kelompok elit. Przeworsky (1988) mengatakan bahwa kelompok elit akan mendukung demokrasi jika mereka yakin bahwa kepentingan mereka akan tercapai dalam kondisi yang demokratis. Hal ini ditegaskan oleh Sorensen (1993) bahwa dukungan elit atas demokrasi lebih disebabkan oleh kepentingan pribadi.

Ironisnya seperti yang telah kita bahas di atas demokratisasi di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal (krisis moneter) daripada oleh kesadaran domestik. Demokrasi tidak tumbuh dari kesadaran internal bangsa Indonesia sebagai pilihan rasional. Masa transisi demokrasi tidak lebih hanya sebagai bentuk respon elit atas terjadinya krisis moneter tersebut. Dalam konteks inilah kita bisa menjelaskan mengapa masa transisi demokrasi di Indonesia tidak berbanding lurus dengan pemberantasan korupsi, yang banyak dilakukan oleh para elit.

KORUPSI: HAMBATAN UTAMA MASA TRANSISI DEMOKRASI DI INDONESIA.

Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah isu besar yang diangkat oleh aktivis reformasi. Hal ini sejalan atas adanya fakta bahwa Orde Baru dibangun di atas pondasi KKN dinasti Cendana. Dinasti Cendana merujuk pada kompleksitas relasi sosial yang saling berhubungan untuk membangun jejaring sosial yang saling menguntungkan. Jejaring sosial ini berpusat pada rumah di Jl. Cendana, Jakarta, tempat dimana Soeharto dan keluarga besarnya tinggal. Pada masa Orde Baru, semua kebijakan negara seringkali ditentukan oleh Dinasti Cendana. Proyek-proyek dan program-program pembangunan dikerjakan dengan melakukan *kongkalikong* antar jejaring sosial yang dimiliki oleh Dinasti Cendana.

Rejim Reformasi menempatkan isu pemberantasan KKN sebagai isu utama lebih disebabkan kesadaran kolektif bahwa demokrasi yang bisa mensejahterakan rakyat tidak mungkin dapat berjalan selama KKN masih menggurita di Indonesia. Namun sayang, masa transisi demokrasi (baca: pasca reformasi) yang terjadi di Indonesia tidak memberi ruang yang cukup pada gerakan-gerakan pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebuah lembaga *ad-hoc* yang khusus dibentuk untuk memberantas korupsi hanya bertaji di awal-awal berdirinya.

Membaca genealogi korupsi yang terjadi pada masa Indonesia modern, perilaku korupsi pada masa transisi demokrasi atau era pasca reformasi justru menunjukkan gejala yang lebih massif. Meminjam istilah Al-Attas, korupsi di era reformasi menuju pada apa yang disebut "*self destruction*." Data dari International Transparency menunjukkan bahwa indeks korupsi di Indonesia pada masa transisi demokrasi tidak pernah menembus angka 3. Data ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi pada masa transisi demokrasi masih menjadi pekerjaan berat.

Satu hal yang harus digaris-bawahi, perilaku korupsi pada masa transisi demokrasi di Indonesia menyebar merata di semua pusat-pusat kekuasaan, baik di pusat maupun di daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah menjadi pintu gerbang semakin merajalelanya korupsi di Indonesia. Pernyataan berikut ini menjelaskan hal tersebut:

Korupsi yang menjerat pejabat di daerah, khususnya gubernur, walikota/bupati sungguh mencengangkan. Dari data Kementerian Dalam Negeri, saat ini ada 148 kepala daerah sudah divonis bersalah menilap uang negara, menjadi terdakwa, tersangka, atau baru diperiksa sebagai saksi. Perinciannya, dari 33 gubernur se-Indonesia, 18 gubernurnya terlibat kasus korupsi. Sementara bupati/walikota sebanyak 130 dari 491 kabupaten/kota yang terlibat korupsi. Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan.²

Artinya, semangat pemberantasan korupsi pada masa transisi demokrasi hanya menjadi lip service, jauh panggang dari api.

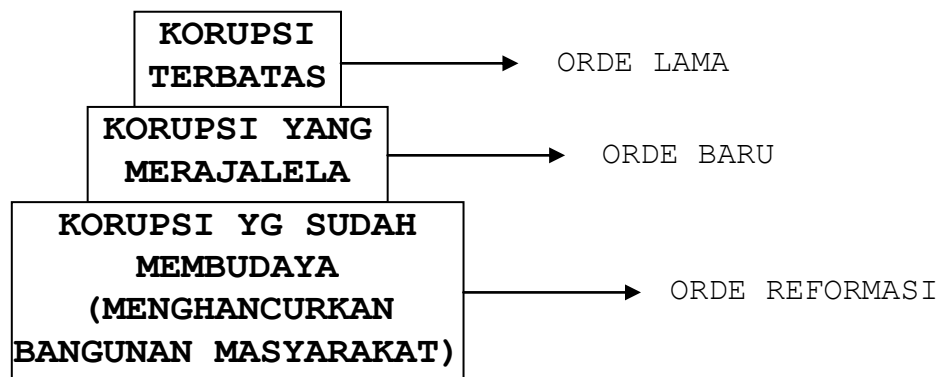
²

[Http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=156239:148-gubernur-a-bupati-terlibat-korupsi-&catid=17:nasional&Itemid=30](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=156239:148-gubernur-a-bupati-terlibat-korupsi-&catid=17:nasional&Itemid=30)

Kasus Indonesia menunjukkan bahwa masa transisi demokrasi berjalan sangat lambat dan bahkan (mungkin) tidak akan pernah berujung pada demokrasi, sebab utamanya adalah perilaku korupsi yang justru semakin tak terkendali. Dirunut secara genealogis, korupsi pada masa transisi demokrasi saat ini adalah fase ketiga, yang justru paling berbahaya. Ketiga fase korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Orde Lama: Sifat korupsinya masih dalam lingkaran elit yang terbatas. Terutama lingkaran yang dekat dengan Soekarno. Nasionalisme perusahaan-perusahaan Belanda dan sistem administrasi juga memicu perilaku korupsi.
- Orde Baru : Korupsi semakin meluas karena Indonesia membuka keran ”utang luar-negeri” di samping memberi porsi lebih bidang ekonomi dlm proses pembangunan. Muncul pengusaha-pengusaha yang dekat dengan penguasa. Korupsi juga terjadi karena investasi asing diberi keleluasaan mengelola Sumber Daya Alam Indonesia.
- Orde Reformasi (masa transisi demokrasi): Korupsi semakin membudaya karena adanya otonomi daerah dan desentralisasi. Jika selama Orba pusat korupsi ada di Jakarta, masa Orde Reformasi korupsi menyebar ke daerah-daerah. PEMILU/PEMILUKADA Langsung juga menjadi ajang praktik korupsi. Korupsi pada era reformasi semakin massif dan terbuka.

Tiga fase genealogis korupsi di Indonesia tersebut, berjalan linear dan mengikuti tahap-tahap penyebaran korupsi yang dikemukakan Al-Attas (1981). Fase era reformasi merujuk pada fase akhir yang mengarah pada kegagalan suatu bangsa. Korupsi yang terjadi pada masa transisi demokrasi jika tidak ditangani secara serius akan mengirim Bangsa Indonesia pada kebinasaan. Mimpi menjadi Negara demokrasi tidak akan pernah terwujud, seperti yang dikhawatirkan oleh Sorensen (1993) dan Wirawan (1998).



Bagan 2. Tahap Penyebaran Korupsi di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Al-Attas
(Sumber: Analisis Pribadi)

Satu-satunya cara untuk menjaga masa transisi demokrasi agar berjalan pada *track* yang benar adalah dengan memperkuat eksistensi KPK. KPK sebagai lembaga yang khusus menangani tindak pidana korupsi harus diberi ruang yang cukup untuk bekerja, tanpa intervensi dari kekuasaan. Namun, masalahnya tidak semudah itu. Seperti yang sudah kita singgung di atas,

masa transisi demokrasi saat ini sebetulnya

bukan kehendak kolektif bangsa Indonesia. Reformasi hadir sebagai respon atas krisis moneter yang melanda Asia. Oleh karena itu, membebankan pemberantasan korupsi hanya pada KPK adalah hal yang tidak bijak. Eksistensi KPK juga harus didukung oleh elit (penguasa). Hal ini menjadi penting karena masa transisi demokrasi tidak akan berujung pada demokrasi selama kalangan elit tidak mendukungnya. Kasus di Indonesia menunjukkan bahwa masa transisi demokrasi tidak bergerak kemana-mana lebih disebabkan tidak adanya kesadaran elit. Para elit di era pasca-reformasi tidak memberi ruang yang cukup untuk tumbuh-suburnya gerakan-gerakan anti-korupsi. Alih-alih berperilaku anti-korupsi, para elit justru mempertontonkan perilaku korupsi secara terang-benderang dan massif.

SIMPULAN

Demokrasi telah menjadi kehendak sejarah di abad 20 dan awal abad 21. Negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk mewujudkan-terapkan demokrasi sebagai alat untuk menata kehidupan berbangsa. Namun, di negara-negara berkembang, jalan menuju demokrasi sangat terjal dan berliku. Untuk konteks Indonesia, masalah terberat yang menjadi beban masa transisi demokrasi adalah perilaku korupsi para elit yang menggurita. Para elit memberi contoh buruk bagi rakyat Indonesia. Perilaku korupsi elit (baik pusat maupun daerah) menjadi kanker ganas yang siap membalikkan masa transisi demokrasi.

Perilaku korupsi di Indonesia pada masa transisi demokrasi sudah pada level *self destruction*, yang tidak hanya berbahaya tetapi juga bisa mengirim Indonesia menjadi negara gagal. Oleh karena itu, isu tentang pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya menjadi pemanis bibir para elit tetapi juga menjadi gerakan nyata. Hal ini penting karena tanpa pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh mustahil masa transisi demokrasi di Indonesia dapat dituntaskan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Attas, Syed Husein, 1981, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta.
- Fukuyama, Francis; 1999, *The End of History and the Last Man*, The Free Press, New York.
- Huntington, Samuel. 1991. *The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman and London: University of Oklahoma Press.
- Irawan, Ketut; 1998, *Demokratisasi, Desentralisasi, dan Governance di Tingkat Lokal di Indonesia*, Departemen Dalam Negeri.
- Kinvall, Catarina, 2002, "Analyzing The Global-Local Nexus", dalam Catarina Kinvall and Kristina Joensson (eds.), *Globalization and Democratization in Asia: The Construction of Identity*, London and New York, Routledge.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'I, 1996, *Islam dan Teori Belah Bambu: Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Madjid, Nurcholis, 1997, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, PARAMADINA, Jakarta, 1997
- Markoff, John, 1996, *Waves of Democracy, Social Movements, and Political Change*.
- Mas'ud, Mochtar; 1994, *Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Przeworski, Adam; 1988, *Democracy as Contingent Outcome*, dalam Jon Elster and Rune Slagstad, *Constitutionalism and Democracy*, Cambridge.
- Sorensen, George; 1998, *Democracy and Democratization: Processes And Prospects In A Changing World*, Westview.
- Suseno, Frans Magnis, 2003, *Pembangunan Berkelanjutan dalam Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan YME, makalah diajukan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, BPHN Depkeh & HAM, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Tsung dan Vaylsteke, 1989, "Taiwan's Democratization Part of the World Trend", dalam The Jakarta Post, 9 dan 10 Juni 1989.
- Waltzer, Herbert, 1975, *Political Democracy*, dalam Reo M Christenson, et.al, *Ideologies and Modern Politics*, Dodd, Mead & Company.